

Judul : Bamsoet dorong RUU SDA sesuai pasal 33 UUD 1945
Tanggal : Sabtu, 23 Maret 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Roda Legislasi

Bamsoet Dorong RUU SDA Sesuai Pasal 33 UUD 1945

KETUA DPR Bambang Soesatyo mendorong Panitia Kerja (Panja) Komisi V DPR dan pemerintah segera menyelesaikan pembahasan RUU Sumber Daya Air (SDA). Ia berharap, peringatan hari Air Sedunia (World Water Day) setiap tanggal 22 Maret dapat menjadi momentum untuk menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut.

"Peringatan hari Air Sedunia tahun ini mengangkat tema 'Water for All, Leaving No One Behind'. Saya berharap, momentum ini menjadi motivasi Panja Komisi V DPR dan pemerintah dalam menyelesaikan RUU SDA sebagai dasar hukum penggunaan dan pemanfaatan air sesuai UUD 1945," ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Selain menyelesaikan RUU SDA, ia juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenuh), melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemendagri) meningkatkan penyediaan air bersih ke seluruh wilayah Indonesia. Utamanya, harap dia, daerah-daerah yang sulit mendapatkan air bersih.

"Persoalan untuk mendapatkan air bersih diberbagai daerah harus dituntaskan. Lakukan pengeboran air tanah agar kebutuhan

masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi," tegas Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo.

Politisi Partai Golkar ini juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda agar berperan aktif dan membangun kesadaran dalam menjaga lingkungan, termasuk air. "Generasi muda harus peduli dan hemat dalam menggunakan air bersih," imbuhnya.

Sebelumnya, Bamsoet juga mendorong Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kemenuh dan Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) melakukan pemetaan terhadap wilayah yang sulit akses air bersih. Menurutnya, penyediaan air bersih untuk masyarakat harus mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 tentang Sumber Daya Air.

"Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) juga harus melakukan inovasi dalam memperoleh air bersih, disesuaikan dengan keadaan di masing-masing wilayah, sebagai bentuk antisipasi jika terjadi krisis air bersih. Dengan begitu, pemerintah menjamin setiap warga negara untuk memperoleh manfaat dari kekayaan alam Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945," tandasnya. ■ ONI